

Judul : Kasus E-KTP : Mantan Ketua DPR Klaim Tak Tahu Aliran Dana Proyek
Tanggal : Sabtu, 04 Februari 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

Kasus E-KTP

Mantan Ketua DPR Klaim Tak Tahu Aliran Dana Proyek

[JAKARTA] Mantan Ketua DPR, Ade Komarudin rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/2) siang. Politikus Partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP.

Kepada wartawan, Ade mengklaim tak tahu menahu mengenai aliran dana hasil korupsi proyek e-KTP yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Namun, Ade mengaku telah menyampaikan seluruh hal yang diketahuinya mengenai proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut kepada penyidik KPK.

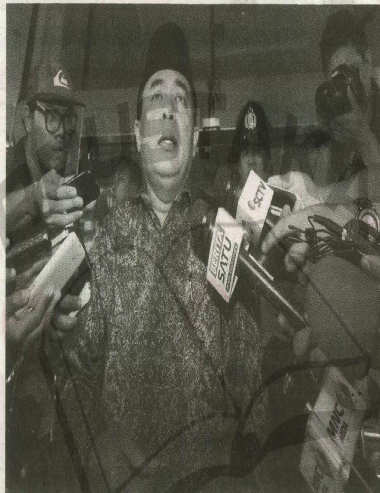
"Saya tidak tahu. Saya bilang semua yang tahu. Kalau soal urusan aliran dana (korupsi e-KTP) saya tidak tahu," kata Ade usai di-

periksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/2).

Ade mengaku pemeriksaan ini berkaitan dengan posisinya sebagai Sekretaris Fraksi Golkar saat proyek e-KTP bergulir. Namun, Ade enggan membeberkan materi pemeriksaannya kali ini. "Tanya ke penyidik, jangan tanya ke saya," katanya.

Ade pun enggan menjawab saat disinggung dalam pemeriksaan ini penyidik mencermatnya mengenai dugaan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto yang saat proyek e-KTP bergulir menjadi Ketua Fraksi Golkar. "Sudah ya sudah," kata Ade sambil masuk ke mobil Toyota Kijang Inova berwarna putih yang membawanya meninggalkan Gedung KPK.

Diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirjen



ANTARA FOTORENO ESNIR

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Ade Komarudin (tengah) menjawab pertanyaan se usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/2).

Dukcapil, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka.

Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Menkumham

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly tidak akan memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Jumat (3/2). Yasonna mengaku telah meminta penyidik KPK untuk menunda pemeriksaannya ini. Yasonna beralasan, pada hari ini sudah dijadwalkan menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka. Sementara, surat panggilan pemeriksaan ini, kata Yasonna, baru diterimanya pada Kamis (2/2) kemarin.

"Oh saya minta ditunda (pemeriksaan), karena kemarin baru terima suratnya. Hari ini saya ada ratas," kata Yasonna, di Gedung Kemkumham, Jakarta, Jumat (3/2).

Yasonna mengaku be-

lum mengetahui secara pasti kepentingan penyidik memeriksanya terkait kasus e-KTP. Namun, Yasonna menduga pemanggilan ini dilakukan penyidik lantaran posisinya sebagai anggota Komisi II DPR saat proyek e-KTP bergulir pada 2011-2012.

"Ini, kan, mungkin bagaimana keputusan di DPR waktu itu. Saya waktu itu anggota Komisi II. Saya enggak tahu, nanti kita dengarnya saja," katanya.

Lebih jauh, Yasonna menduga, dalam pemeriksaan ini, penyidik akan mempertanyakan mengenai kebijakan Komisi II DPR terkait proyek e-KTP. Termasuk mengenai keputusan untuk menetapkan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. Namun, Yasonna mengklaim tak mengetahui secara rinci mengenai hal tersebut. [F-5]